

# EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang)

**Muhammad Wirawan, Bambang Satoso Haryono, Minto Hadi.**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: *weirawan@gmail.com*

*Abstrak: The Evaluation Over School Operational Grant (BOS) Funding Policy To Improve Education Quality (study at Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Malang City). School Operational Grant (BOS) Program is aimed to relieve the burden of community in paying education cost to fulfill 9-year mandatory learning program. This grant policy must be monitored to ensure that the target is achieved. Malang City has been an education city to implement BOS. To ascertain that the error in the use of BOS is minimized, evaluation must be conducted over School Operational Grant (BOS) Funding Program. Research type is descriptive with qualitative approach. Data collection techniques include observation and interview. Result of research indicates that the implementation of BOS funding policy at city or school levels, including at SDN Percobaan 1 of Malang City, has been favorable and based on the procedure as stated in technical guide of BOS funding. The participation of community is needed to provide the input or even the surveillance over BOS funding program*

**Keywords:** *evaluation over policy, school operational grant funding, education quality*

**Abstrak: Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang).** Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meringankan biaya masyarakat dalam menjalankan wajib belajar 9 tahun. Agar tepat sasaran dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Kota Malang termasuk Kota Pendidikan yang juga melaksanakan Program Bantuan Operasional Sekolah. Dalam penggunaannya agra tidak terjadi kesalahan, maka sangat perlu ada evaluasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukan serta pengawasan akan program dana BOS.

**Kata Kunci:** evaluasi kebijakan, dana bantuan operasional sekolah, mutu pendidikan

---

## Pendahuluan

Pendidikan dalam era global menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dianggap sepele. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dapat dikatan berguna dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan salah satu factor yang dapat mensejahterakan masyarakat dan Negara.

Melihat sangat pentingnya pendidikan, maka pemerintah juga membantu masyarakat untuk mewujudkannya dengan mendorong masyarakat agar melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan dengan memberikan suntikan dana Bantuan Operasional Sekolah. Dengan program tersebut, pemerintah berharap agar masyarakat Indonesia minimal telah menyelesaikan wajib belajar tanpa merasa keberatan akan keuangan.

Untuk melihat keefektifan program tersebut, maka peneliti mencoba meneliti melalui evaluasi kebijakan dana bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dirasa peneliti sangat tepat karena peneliti mengiginkan apakah keinginan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan 9 tahun diimbangi dengan mutu pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mulai dari pelaksanaan sampai evaluasi kebijakan dengan melihat output dan outcome, serta melihat faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dilapangan.

## Tinjauan Pustaka

### A. Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Kebijakan

Istilah kata kebijakan (*policy*) memiliki arti yang sangat bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy (1991, h.15) memberikan arti kebijaksanaan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Namun dari beberapa pendapat dapat ditarik garis besar mengenai definisi kebijakan. Secara garis besar kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok guna untuk memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan atau mencapai tujuan tertentu.

#### 2. Pengertian Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik sama halnya dengan definisi kebijakan itu sendiri yang memiliki arti yang sangat luas dan bermacam-macam. Seperti yang diungkapkan Islamy (1991, h.20) mengemukakan beberapa implikasi pengertian kebijaksanaan negara (*publik policy*) sebagai berikut:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintahan.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan aktor utama dalam melaksanakan kebijakan publik yang ditujukan untuk memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh masyarakat demi kepentingan masyarakat (publik)

### B. Evaluasi Kebijakan

#### 1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Wibawa (1994, h.8) kegiatan evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, supervisi, penyeliaan, pengendalian, kontrol, dan pemantauan. Pelaku utama sudah jelas adalah pemerintah, akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen, partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan evaluasi.

Evaluasi dapat dipilih-pilih menurut beberapa hal, menurut jenis yang dievaluasi.

Menurut pelakunya (*Evaluator*), menurut lingkungannya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam modul akuntabilitas kinerja dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, seperti: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

#### 2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Tujuan dari evaluasi memiliki sudut pandang berbeda-beda tergantung dari pihak mana yang melakukan pengevaluasian dan dari berbagai kepentingan pula. Menurut Widoyoko (2010, h.6) adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/ hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

#### 3. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi ini tentu ada fungsi dan tujuan, salah satunya sebagai monitor dari kebijakan yang telah dilaksanakan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Sedangkan menurut pendapat dari Guba dan Lincoln dalam Wahab (200, h.8) ada lima fungsi penting dari evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi mengemban fungsi Evaluasi sebagai kemudi dan manajemen.
2. Evaluasi sebagai fungsi kontrol dan inspeksi.
3. Evaluasi sebagai fungsi akuntabilitas.
4. Evaluasi sebagai fungsi kepenasehatan.

Sedangkan menurut Dunn dan Ripley dalam Wibawa (1994, h.10), evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi sebagai: Eksplanasi, Kepatuhan, Auditing dan Akunting.

#### 4. Pendekatan-pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan

Ada beberapa pendekatan-pendekatan dalam evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam Agustino (2008, h.187) ialah: evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

#### 5. Model Evaluasi Kebijakan

Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi menurut Umar (2002, h.41), yaitu: *Sistem Assesment, Program Planing, Program Implementasi, Program Improvemnet, dan Program Certification.*

## C. Pendidikan

### 1. Pengertian Pendidikan

Menurut beberapa ahli tentang apa yang disebut pendidikan dalam Idriz (1982, h.9) adalah:

- a. John Dewey menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kerah alam dan sesama.
- b. S.A. Branata, dkk menyebutkan bahwa pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya.
- c. Rousseau menyebutkan bahwa pendidikan adalah memberikan kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

### D. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan juga dapat menunjukkan tingkat baik/buruknya *input*, proses dan keluaran/*output* dari pendidikan yang dalam hal ini khususnya pendidikan di lingkungan sekolah dalam mentutaskan kebutuhan pendidikan yang ditentukan.

### E. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Samiawan dalam Supriadi (2003, h.572) menyebutkan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui dua strategi yaitu: peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pendidikan keterampilan dalam segi mental maupun fisik (*dexterity*) yang berbasis luas, dan peningkatan mutu pendidikan yang secara lebih berorientasi akademis.

### Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor juga dalam Moleong (2000, h.3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus penelitian adalah Pelaksanaan dari kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Percobaan 1 Kota Malang, dengan melihat dari: 1) Penyaluran, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 2) Evaluasi kebijakan dengan melihat Output dan Outcome, 3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Meningkatkan Mutu pendidikan di SDN Percobaan 1 Kota Malang.

lokasi penelitian ini adalah di Kota Malang. Sedangkan situs penelitian ini adalah SDN Percobaan 1 Kota Malang. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan dari kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pendanaan dari pemerintah murni untuk mendanai biaya operasional sekolah. Prosedur pertama diawali dengan penunjukkan kepada Organisasi Pelaksana, mulai dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah. Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah. Mekanisme selanjutnya menentukan jumlah alokasi dana, dimana pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Dalam proses pembuatannya harus detail dan terperinci, oleh karena itu dalam proses pembuatannya melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Seluruh data-data dikirimkan kepada Tim Manajemen Kabupaten/Kota untuk diaudit dan diteruskan ketingkat atas. Proses pencairan dana dilaksanakan dalam 3 bulanan sekali setiap tahun dan diambil langsung oleh Bendahara Sekolah dengan persetujuan Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Ketua Komite. Untuk penyaluran dana, lembaga yang dipilih untuk menyalurkan dana oleh Kota Malang adalah Bank Jatim.

Bentuk pertanggungjawaban dana BOS di SDN Percobaan 1 Kota Malang diawali dengan pembuatan laporan SPJ yang disertai dengan bukti-bukti transaksi dan pengarsipan data keuangan oleh pihak sekolah dan menyimpannya di suatu tempat yang aman dan mudah diambil suatu saat. Sesuai prosedur pihak sekolah wajib menyampaikan laporan dana BOS ke walimurid saat penerimaan rapot, selanjutnya menyerahkan laporan yang dibuat oleh Bendahara Sekolah kepada UPT. Selain itu ada pula bentuk pemantauan yang dilakukan oleh instansi lainnya seperti BPK dan KPK yang melakukan sidak kesekolah secara mendadak dengan melihat data-data mengenai keuangan. Hal ini

menunjukkan sekolah ini sangat transparansi dan bertanggungjawab penuh mengenai penggunaan dana BOS tersebut.

## **2. Evaluasi dengan melihat *output* dan *outcome* dari kebijakan dana BOS**

### **1. *Output* dari pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Sejak dimulainya program ini pada tahun 2005, memang program ini memberikan manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh pihak sekolah dan masyarakat. Ada beberapa *output* yang dirasakan baik dari pihak sekolah dan masyarakat selaku walimurid di SDN Percobaan 1 Kota Malang yakni: Meringankan biaya operasional sekolah, Peningkatan Mutu melalui Program Sekolah dan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah.

### **2. *Outcome* dari pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Melihat dari perkembangan lulusan di SDN Percobaan 1 Kota Malang yang dikatakan baik dengan nilai rata-rata dan tingkat lulusan mencapai 100% bisa dikatakan bahwa program dana BOS cukup berhasil dalam menunjang wajib belajar 9 tahun, akan tetapi bila dikatakan dapat meningkatkan mutu pendidikan masih jauh dari harapan. Di sekolah tersebut memang dikatakan sekolah yang bermutu, tapi hal tersebut bukan semata-mata dari pemberian dana BOS saja, ada beberapa faktor yang menjadi penunjang seperti tingkat kemampuan orangtua dari kalangan yang cukup baik

### **3. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dalam pelaksanaan program ini yang menjadi faktor pendukung adalah kerjasama antara staf guru yang mau saling membantu untuk melakukan proses dari perencanaan

pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan proses pelaporan meliputi pengarsipan data keuangan. Selain itu keadaan sekolah yang dirasakan sudah cukup layak sehingga penggunaan dana BOS tidak terlalu difokuskan kepada perbaikan sekolah.

### **4. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang administrasi keuangan merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan program dana BOS. Di SDN Percobaan 1 Kota Malang hanya Bendahara Sekolah saja yang memahami mengenai administrasi keuangan sehingga Kepala Sekolah hanya menunjuk Bendahara sekolah sebagai pengelola dana BOS. Selain itu peran serta wali murid yang masih kurang juga menjadi kendala karena dengan keterlibatan walimurid juga membantu proses kelancaran dalam pelaporan sehingga kedepannya dana BOS bisa diarahkan tepat sasaran.

### **Kesimpulan**

Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat memberikan banyak sekali manfaat yang didapat baik oleh pihak sekolah dan masyarakat yang menjadi sasaran awal dari pemberian bantuan ini. Dalam pelaksanaannya terutama di SDN Percobaan 1 Kota Malang sangat terlaksana sesuai dengan tujuan awal dari program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini. Mulai dari proses penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan prosedur. Manfaat lain yang sangat terasa adalah *Output* dan *Outcome* dari pemberian dana BOS ini kepada baik sekolah dan masyarakat terutama wali murid yang berada dalam kalangan menengah ke bawah.

---

### **Daftar Pustaka**

- Abdul-Wahab, Solichin. (2001) **Evaluasi Kebijakan Publik**. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Abdul-Wahab, Solichin. (2005) **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2008) **Dasar-dasar Kebijakan Publik**. Bandung: Alfabeta.
- Depdikbud. (1996) **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Idriz, Zahara. (1982) **Dasar-dasar Kependidikan**. Bandung: Angkasa.
- Islamy, M. Irfan. (1991) **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexy. (2000) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Umar, Husein. (2002) **Evaluasi Kinerja Perusahaan**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wibawa, Samudra. (1994) **Evaluasi Kebijakan Publik**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, Eko, Putro. (2010) **Evaluasi Program Pembelajaran**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2007) **Kebijakan Publik Teori dan Proses**. Yogyakarta: Media Presindo.